

**PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PINELENG
KABUPATEN MINAHASA**

Michael Stephanus Mantiri¹

Abstrak

Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh karena itu pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. sampel yang ditentukan sebanyak 80 responden yang tersebar di lima desa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Pineleng mempunyai hubungan kontributif atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi pelaksanaan fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, maka akan mendorong peningkatan keberhasilan pembangunan desa. Kesimpulan menghantar untuk melakukan uji hipotesis dengan menerapkan uji Chi-Square. Hasil analisis Chi-Square di peroleh harga $X^2_{hit} = 10.349$ sementara X^2_{tab} dengan dk 4 dan tingkat signifikan 5% ($\alpha : 0.05$) diperoleh sebesar 9.288. Dengan demikian $X^2_{hit} > X^2_{tab}$ ($10.349 > 9.488$) pada taraf uji 5%. Hasil perhitungan menunjukkan adanya hubungan/pengaruh yang bermakna atau nyata (signifikan) antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan pada tingkat signifikan 5%, sekaligus telah teruji hipotesis penelitian yang menyatakan Pelaksanaan fungsi pengawasan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Keberhasilan Pembangunan.

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi¹

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dewasa ini pelaksanaan kegiatan pembangunan dihadapkan pada berbagai tantangan dan persaingan yang ketat, sehingga dibutuhkan upaya dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan agar mencapai sasaran pembangunan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Seiring dengan begitu kompleksnya permasalahan pembangunan dan terlalu rumitnya pelaksanaan pembangunan, maka untuk memperkecil luasnya masalah-masalah pembangunan pemerintah telah memberlakukan UU no. 22 tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengintrodusir secara tegas perlunya penerapan prinsip-prinsip otonomi desa yang ditandai dengan dibentuknya lembaga-lembaga/badan-badan lain, selain pemerintah desa sebagai mitra kerja pemerintah desa. Dalam kaitan itu, berperannya masyarakat merupakan salah satu kunci utama bagi terselenggaranya pembangunan desa. Dengan kata lain bahwa keikutsertaan masyarakat desa diharapkan mampu mengelola pembangunan desa baik dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing dan pendamping serta memberi bantuan fasilitas yang diperlukan.

Beberapa hal yang dijelaskan diatas terlihat pula menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan desa di wilayah kecamatan Pineleng sebagai obyek penelitian, dimana fungsi pengawasan yang dilakukan Oleh Badan Perwakilan Desa (DPD) maupun lembaga lain terhadap pelaksanaan pembangunan desa di wilayah kecamatan Pineleng ini kurang efektif

yang pada akhirnya menghambat keberhasilan pembangunan desa.

Kerangka Teori

1. Pengertian Pengawasan

Fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi dari manajemen menurut George Terry (1986) mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Selanjutnya disampaikan bahwa pengawasan dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam hasil yang dicapai dari aktifitas-aktifitas yang direncanakan. Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu : 1) Mengukur hasil pekerjaan, 2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan apabila ada perbedaan dan 3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Dalam artian lain George Terry mengemukakan bahwa Pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan: a) Mencari keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan b) Membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan dan c) Penyetujuan hasil-hasil dalam kasus mana yang perlu ditambahkan penambahan tindakan-tindakan perbaikan. Menurut Siagian (1984) Pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan rencana kegiatan disebut Pengawasan Represif. Pengawasan Represif ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Pengawasan Pembangunan Desa

Dilihat dari kedudukan pengawasan sebagai fungsi manajemen, maka pengawasan pembangunan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan menentukan keberhasilan suatu usaha pembangunan. Menurut Steis (Kertasawita:1977) bahwa salah satu fungsi pengawasan adalah meningkatkan kebertanggung jawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sector public. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi (corrective actions) jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sarana yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dari pembenahan dari fungsi-fungsi pengawasan sering kali lebih dititik beratkan pada penanganan sumber-sumber dana (financial resources) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan secara menyeluruh. R.S. Tangkudung (1986) mengemukakan efisiensi dan efektifitas pengawasan dapat ditempuh dengan cara:

a. Internal control (pengawasan dari dalam) :

Pengawasan ini dilakukan oleh petugas pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan bertindak atas nama

pimpinan organisasi. Data dan informasi yang diperoleh dilaporkan kepada pimpinan organisasi untuk diteliti dan dipergunakan dalam menilai kemajuan atau kemunduran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dari hasil pengawasan, pemimpin dapat mengadakan tindakan-tindakan perbaikan.

b. Ekternal control (pengawasan dari luar) :

Pengawasan dari luar ialah pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawasan dari luar organisasi;

c. Pengawasan Prefentif

Pengawasan ini dilakukan sebelum rencana dilaksanakan dengan maksud mencegah terjadinya kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan.

Keempat pengawasan yang dikemukakan diatas menekankan bahwa perencanaan sangat berhubungan erat dengan pengawasan. Pelaksanaan perencanaan tanpa adanya pengawasan akan memungkinkan terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan kata lain pengawasan merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan terhadap pembangunan desa terutama pada program-program atau proyek-proyek yang dibiayai oleh dana yang berasal dari anggaran bantuan pemerintah pusat maupun dana swadaya partisipasi masyarakat.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya tentang Pembangunan Desa dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur pembangunan desa adalah :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya inisiatif sendiri dari masyarakat
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya
- d. Adanya bantuan teknis dan pelayanan dari pemerintah.

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Desa yang diharapkan perlunya Fungsi Pengawasan dilakukan secara efektif sehingga Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat terealisasi sesuai rencana yang sudah dibuat dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pedesaan.

3. Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa.

Keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas penerapan fungsi manajemen pengawasan pembangunan desa. Dalam artian lain, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan desa mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. George Terry (1986) mengemukakan prinsip pengawasan adalah bahwa pengawasan secara efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Menurut Prajudi Atmosudirjo (1980) dengan pengawasan akan dapat dilakukan pengukuran atau perbandingan mengenai apa yang sedang atau akan dilaksanakan nanti apa sesuai dengan kriteria-kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan. Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa dengan pengawasan diatas pelaksanaan rencana maka akan mengusahakan upaya

pelaksanaan rencana itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat penyimpangan dapat diketahui sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut terjadi dibandingkan dengan perkiraan semula, dan kemudian diambil langkah-langkah kebijakan korektif. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi Perencanaan dengan demikian menjadi jelas bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang direncanakan dan diarahkan di pedesaan juga ditentukan oleh adanya pengawasan dalam arti kata keberhasilan pelaksanaan pembangunan dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan.

Hipotesa

Hipotesa yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa di Kecamatan Pineleng”.

Metodologi Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Penelitian ini melibatkan dua variabel penelitian yaitu : Pengaruh Fungsi Pengawasan sebagai variabel bebas (variable X) dan Keberhasilan Pembangunan Desa, sebagai variable terikat (variable Y). Adapun definisi operasional dan indicator pengukuran masing-masing variabel dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pengaruh Fungsi Pengawasan didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program pembangunan desa, sehingga pelaksanaannya berjalan

sesuai rencana dan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat desa, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga lain yang ada di desa. Sejauhmana pengawasan pembangunan di desa dilakukan diukur melalui beberapa indicator sebagai berikut :

1. Personalia petugas atau unsur yang dilibatkan dalam melakukan pengawasan.
 2. Metode atau system prosedur, seperti tatakerja, langkah-langkah dan cara pelaksanaannya.
 3. Sarana yang digunakan, misalnya melalui laporan, diskusi dan lain-lain.
 4. Tindak lanjut hasil pengamatan, pemantauan dan evaluasi.
- b. Keberhasilan Pembangunan Desa, didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kondisi prestasi yang dicapai secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam wujud peningkatan kondisi dan taraf hidup dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan mkemandirian masyarakat berupa realisasi program-program dan proyek-proyek pembangunan desa yang ditetapkan atau direncanakan baik program proyek yang berasal dari pemerintah maupun program dan proyek yang berasal dari tingkat desa. Indicator pengukurannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat, diukur dari hal-hal seperti: Peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan taraf hidup keluarga, peningkatan kesehatan gizi keluarga, dan peningkatan dalam pemenuhan

kebutuhan lainnya antara lain transportasi, hiburan dan sebagainya.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam, diukur dari peningkatan kesadaran dan kemampuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan seperti: memberi sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga kerja, memberi sumbangan material baik berupa uang maupun bahan peralatan kerja yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan desa.
3. Peningkatan kemampuan berkembang secara kebutuhan secara keluarga secara mandiri atau atas usaha sendiri, kemampuan mengembangkan usaha, kemampuan menabung dan lain sebagainya.
4. Tingkat tercapainya tujuan, sasaran dari program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan, baik dilihat dari aspek fisik pembangunan, maupun aspek manfaatnya bagi masyarakat setempat dan bagi kehidupan mereka.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Lokasi penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dengan populasi semua karakteristik yang berhubungan dengan pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dengan menentukan desa-desa sebagai sampel dan tahap kedua dengan menentukan besar sampel responden. Area sampel penelitian dipilih secara random sampling sebanyak lima desa dari jumlah desa yang ada diwilayah Kecamatan Pineleng.

Tabel 1. Nama-nama Desa dan Penduduk

No	Nama Desa	RT	Penduduk		Jumlah	Rata2 Per RT
			L	P		
1	Pineleng satu	710	1438	1438	2876	3.83
2	Pineleng dua	897	1941	1940	3881	4.33
3	Kali	869	1600	1553	3153	3.63
4	Warembungan	939	1875	1800	3675	3.91
5	Sea	518	1235	1150	2385	4.60
6	Sea satu	425	1100	569	1669	3.93
7	Sea dua	317	625	500	1125	3.55
8	Kalasey satu	786	1500	1278	2778	3.53
9	Kalasey dua	309	700	572	1272	4.12
10	Tateli	1122	2283	2283	4566	4.07
11	Tateli weru	376	1806	1810	3616	9.62
12	Koha	896	1648	1648	3296	3.68
13	Agotey	159	260	260	520	3.27
	Jumlah	8363	18011	16801	34812	4.17

Sumber: Data Kecamatan Pineleng.

Adapun kelima desa yang menjadi sampel obyek penelitian adalah

1. Desa Warembungan.
2. Desa Pineleng Satu.
3. Desa Kali.
4. Desa Sea.
5. Desa Koha.

Setiap desa diambil sampel responden sebanyak 16 orang yang terdiri dari :

- a. Unsur pemerintah desa sebanyak 8 orang
- b. Unsur lembaga masyarakat desa sebanyak 6 orang
- c. Unsur tokoh masyarakat/agama sebanyak 2 orang

Dengan demikian jumlah sampel responden secara keseluruhan untuk 5 desa berjumlah 80 orang.

3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen atau alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) dengan melalui wawancara dimana setiap data yang didapat sebagai informasi dikumpulkan dengan teknik penelitian survey dan

observasi partisipan. (Sutrisno Hadi 1986).

Hasil Penelitian

Untuk menggambarkan sejauhmana hubungan / pengaruh variabel pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan terhadap tingkat keberhasilan pembangunan desa, khususnya desa-desa di wilayah Kecamatan Pineleng, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan tabulasi silang mendatar untuk melihat kecenderungan jawaban responden. Untuk maksud tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Tabulasi silang tentang presentasi hubungan/pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (X) terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa (Y) di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pineleng.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan		Keberhasilan Pembangunan desa			Jumlah
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1		2	3	4	5
Tinggi	(f) (%)	2 7.7	7 26.9	17 65.4	26 100.0
Sedang	(f) (%)	3 11.5	16 61.5	7 26.9	26 100.0
Rendah	(f) (%)	6 21.4	11 39.3	11 39.3	28 100.0
Jumlah		11	34	35	80

Bertitik tolak dari hasil analisa data pada hasil silang diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 26 responden, setelah dihubungkan dengan tingkat keberhasilan pembangunan desa ternyata 7.7% berada dalam kategori tinggi atau berhasil. Selanjutnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kategori sedang 26 responden, setelah dihubungkan dengan tingkat keberhasilan pembangunan desa ternyata sebesar 26.9% berada pada kategori sedang atau kurang berhasil.

Kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kategori rendah yaitu sebanyak 28 responden setelah dihubungkan dengan tingkat keberhasilan pembangunan desa ternyata sebagian besar 65.4% berada dalam kategori rendah atau belum berhasil. Mengacu pada hasil analisis data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Pineleng mempunyai hubungan kontibutif atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi pelaksanaan fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, maka akan mendorong peningkatan keberhasilan pembangunan desa. Kesimpulan sementara menghantar penulis untuk melakukan uji hipotesis dengan menerapkan uji Chi-Square. Hasil analisis Chi-Square di peroleh harga $X^2_{hit} = 10.349$ sementara X^2_{tab} dengan dk 4 dan tingkat signifikan 5% ($\alpha : 0.05$) diperoleh sebesar 9.288. Dengan demikian $X^2_{hit} > X^2_{tab}$ ($10.349 > 9.488$) pada taraf uji 5%.

Hasil perhitungan diatas menunjukan adanya hubungan/pengaruh yang bermakna atau nyata (signifikan) antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan pada tingkat signifikan 5%, sekaligus telah teruji hipotesis penelitian yang menyatakan "Pelaksanaan fungsi pengawasan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng". Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan desa, maka perlu dilakukan perhitungan koefisien kontingensi maksimum (KKmaks). Hasil analitis data dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi, diperoleh

harga $KK = 0,3384$, sedangkan harga $1/2KK_{maks} = 0.4082$. hasil ini menunjukan bahwa harga KK lebih kecil dari harga $1/2KK_{maks}$. Dengan demikian hubungan antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan tidak terlalu kuat atau kurang erat. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pelaksanaan pembanguna yang dalam prosesnya turut diawasi oleh berbagai unsur dalam masyarakat akan berjalan sesua rencana sehingga dapat dioptimalkan tingkat keberhasilannya.

Kesimpulan

1. Keberhasilan Pembagunan desa adalah suatu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tujuan pembangunan. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang ada di desa-desa Kecamatan Pineleng belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan desa mengakibatkan keberhasilan pembangunan desa belum dicapai secara optimal. Beberapa hal yang turut memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan desa belum optimal antara lain : Sumberdaya Aparat masih rendah, kepemimpinan pemerintah desa dan kondisi lingkungan kerja aparat desa yang kurang optimal.
2. Rata-rata pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan didesa-desa dalam Wilayah Kecamatan Pineleng berdasarkan hasil penelitian berada pada kategori rendah atau belum berjalan secara optimal.
3. Antara pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Keberhasilan pembangunan desa terdapat

hubungan/pengaruh yang positif dan signifikan serta bersifat konstruktif.

4. Hal lain yang menyebabkan kurang berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Pineleng merupakan konsekuensi dari kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan rencana proyek dan program pembangunan dan kurang meratanya manfaat pembangunan yang diterima masyarakat di desa.

Saran

1. Diperlunya upaya-upaya konkret dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa untuk mengambil kebijakan khususnya dibidang pendidikan dan latihan bagi aparat desa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Pineleng.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat keberhasilan pembangunan desa di wilayah kecamatan Pineleng relative kurang berhasil yang diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Sumberdaya aparat desa, kepemimpinan pemerintah desa serta lingkungan kerja yang kurang kondusif maka perlu diusahakan upaya-upaya pemberdayaan bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Pineleng.
3. Diperlukan adanya koordinasi dalam proses pelaksanaan pengawasan baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa agar efektifitas pengawasan dapat dicapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, Dr, 1993, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, Rineka Cipta Jakarta,

AtmosudirdjoPrajudi, 1980, Dasar-dasar Manajemen dan office Manajemen, Ghalia Indonesia Jakarta.

Beratha I Nyoman, 1982, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia Jakarta.

Betten T.R. 1979, Pembangunan Masyarakat Desa, terjemahan Sujardi, Alumni Bandung.

Handyaningrat Soewarno, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung Jakarta.

Kartasmita Ginanjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan pertumbuhan dan pemerataan) Jakarta PT Pustaka SIdensendo.

,1997,Administrasi

Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia), Cet, 1 LP3ES Jakarta.

Kepmendagri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

Nawawi Hadari, 1989, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, Erlangga.

Ndraha Talizidu, 1987, Pembangunan Masyarakat Bina Aksara, Jakarta

Sayogyo, Pujiwati, 1980, Sosiologi Pedesaan, Gajahmada University press, Yogyakarta.

Siagian S.P, 1985, Administrasi Pembangunan, cet.11 Gunung Agung Jakarta.

Siagian H, 1989, Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suhendra K. Dr, SH, MSi, 2006, Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, Bandung.